

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Di Gorontalo

Abdul Latif¹ Fadilah Kadir², Farhan Sukarno Putra³, Hadija Inangge⁴

¹⁻⁴ Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

E-mail: abdullatif1003@gmail.com¹, fadilakadir@gmail.com², farhansukarno17@gmail.com³,
hinagge@gmail.com⁴

Korespondensi : abdullatif1003@gmail.com

Abstract. *The role of local government in facilitating the Hajj pilgrimage in Gorontalo is crucial for the smooth execution of this religious obligation. This research delves into the multifaceted involvement of the local government, examining its policies, logistical support, and coordination efforts. Employing a qualitative case study approach, the study evaluates the effectiveness of government policies, challenges faced during the Hajj execution, and the potential areas for enhancement. Findings reveal the significant contributions made by the Gorontalo local government in providing necessary facilities, yet also uncover challenges such as resource limitations and coordination complexities. Recommendations include improving inter-agency collaboration, enhancing policy responsiveness, and infrastructure development to ensure more efficient and satisfactory Hajj experiences. The study serves as a foundational exploration highlighting the importance of government support for successful Hajj implementation in Gorontalo.*

Keywords: *Government Role, Hajj Pilgrimage, Local Government, Policy, Gorontalo.*

Abstrak. Peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi ibadah Haji di Gorontalo memiliki peranan yang krusial untuk kelancaran pelaksanaan kewajiban agama ini. Penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan beragam pemerintah daerah, mengkaji kebijakannya, dukungan logistik, dan upaya koordinasinya. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah, tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan Haji, serta potensi perbaikan. Temuan menunjukkan kontribusi signifikan pemerintah daerah Gorontalo dalam menyediakan fasilitas penting, namun juga mengungkapkan tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas koordinasi. Rekomendasi meliputi peningkatan kolaborasi antarlembaga, respons kebijakan yang lebih baik, dan pengembangan infrastruktur untuk memastikan pengalaman Haji yang lebih efisien dan memuaskan. Studi ini menjadi eksplorasi dasar yang menyoroti pentingnya dukungan pemerintah untuk kesuksesan pelaksanaan Haji di Gorontalo.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Ibadah Haji, Pemerintah Daerah, Kebijakan, Gorontalo.

LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah Haji di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada aspek logistik dan administratif, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan jamaah haji serta pengaturan berbagai kebijakan terkait pelaksanaan ibadah Haji.¹

Gorontalo, sebuah provinsi yang kaya akan budaya dan tradisi, memiliki sejarah panjang dalam menyelenggarakan ibadah Haji bagi warga muslimnya. Pemerintah daerah Gorontalo telah berperan aktif dalam mendukung fasilitasi dan pengorganisasian jamaah haji setiap

¹ Azhari, I. M. (2022). *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

tahunnya. Namun, dalam proses pelaksanaannya, terdapat dinamika serta tantangan tersendiri yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan para jamaah.

Dalam review terkait topik penelitian, terdapat keterbatasan dalam pemahaman mendalam tentang efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Gorontalo dalam menyelenggarakan ibadah Haji. Analisis gap menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akan penelitian yang fokus pada evaluasi menyeluruh terhadap aspek kebijakan, pendanaan, fasilitas, serta koordinasi antarinstansi terkait dalam pelaksanaan ibadah Haji di Gorontalo. Keterlibatan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan yang muncul selama proses ibadah Haji menjadi krusial untuk diperdalam guna meningkatkan efektivitas dan kepuasan jamaah².

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ibadah Haji di Gorontalo serta mengevaluasi peran serta kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah daerah Gorontalo guna meningkatkan penyelenggaraan ibadah Haji yang lebih efisien, aman, dan nyaman bagi para jamaah.

KAJIAN TEORITIS

A. Peran Pemerintah dalam Manajemen dan Pengaturan Ibadah Haji

Pemerintah memiliki peran penting dalam manajemen dan pengaturan ibadah Haji karena memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar, aman, dan teratur bagi jutaan jamaah yang datang setiap tahun. Konsep tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi landasan utama dalam peran pemerintah dalam mengelola ibadah Haji. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan menjadi fokus utama dalam memastikan penyelenggaraan ibadah Haji berjalan dengan baik.³

Teori manajemen publik juga menjadi dasar dalam peran pemerintah dalam mengatur administratif, logistik, dan keuangan ibadah Haji. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur, layanan kesehatan, transportasi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh jamaah Haji. Pengelolaan dana yang bersumber dari biaya pendaftaran

² Enjang Bahri, 'Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt.Nabila Travel Di Kota Medan', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19.2 (2020), 384-96 <<https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2535>>.

³ ABDUL HALIK, A. H. (2020). *PELAYANAN CALON JAMAAH HAJI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TORAJA UTARA* (Doctoral dissertation).

jamaah, termasuk penggunaannya untuk penyediaan fasilitas dan layanan, menjadi bagian integral dalam manajemen keuangan yang harus diatur secara transparan dan akuntabel.

Teori koordinasi dan kolaborasi antarlembaga juga sangat relevan dalam peran pemerintah dalam manajemen ibadah Haji. Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, otoritas bandara, pihak keamanan, serta pihak swasta dalam mengatur segala aspek terkait ibadah Haji. Koordinasi yang baik antarlembaga menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua persiapan dan pelaksanaan ibadah Haji berjalan secara sinergis dan efisien.⁴

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi bagian penting dalam peran pemerintah dalam manajemen ibadah Haji. Pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi digital memudahkan pengelolaan data jamaah, pendaftaran, alokasi tempat tinggal, serta memberikan informasi penting kepada jamaah terkait prosedur dan persyaratan ibadah Haji.⁵

Selain itu, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga merupakan bagian integral dari peran pemerintah dalam manajemen ibadah Haji. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ibadah Haji setiap tahunnya untuk mengetahui kekurangan, menemukan solusi, dan melakukan perbaikan demi penyelenggaraan yang lebih baik di masa yang akan datang.

B. Kebijakan Publik dalam Konteks Ibadah Haji

Dalam konteks pelaksanaan ibadah Haji di tingkat daerah, kebijakan publik memiliki peran krusial dalam memastikan ketersediaan fasilitas, keamanan, dan kepuasan jamaah. Teori perumusan kebijakan menjadi titik awal dalam menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah Haji. Pemahaman terhadap aspirasi dan kebutuhan jamaah menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang mencakup penyediaan akomodasi, transportasi, fasilitas kesehatan, dan dukungan lainnya.

Implementasi kebijakan publik memainkan peran penting dalam menjalankan rencana yang telah dirumuskan. Tingkat efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Pemerintah daerah

⁴ Nugroho, D. H. S. (2022). *Pertempuran Bangsa Melawan Covid-19*. Elex Media Komputindo.

⁵ Khasanah, U. (2022). *..(GUNAKAN TTD ASLI BUKAN SCAN PADA LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI, GUNAKAN SCAN WARNA PADA LEMBAR PERNYATAN KEASLIAN TULISAN, TAMBAHKAN WATERMARK, UPLOAD ULANG).. Tinjauan Maşlahah Program Kartu Nikah Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

bersama instansi terkait perlu bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dengan baik agar jamaah dapat terlayani secara optimal selama menjalankan ibadah Haji.⁶

Evaluasi kebijakan publik merupakan langkah penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini mencakup aspek keamanan, kepuasan jamaah, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dari hasil evaluasi inilah akan diambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah Haji di masa mendatang.

Dampak kebijakan publik terhadap kepuasan dan keamanan jamaah menjadi sorotan utama dalam analisis kebijakan. Kebijakan yang berhasil memberikan layanan yang memadai, fasilitas yang baik, serta pengamanan yang efektif akan meningkatkan tingkat kepuasan jamaah. Sebaliknya, kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik atau tidak memenuhi kebutuhan jamaah dapat berdampak negatif terhadap pengalaman ibadah Haji mereka.

Pemahaman mendalam tentang teori-teori perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat merancang dan melaksanakan kebijakan yang tepat guna, efektif, dan berdampak positif bagi pelaksanaan ibadah Haji jamaah setiap tahunnya.

C. Manajemen Resiko dan Keamanan dalam Ibadah Haji

Manajemen risiko dan keamanan menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan ibadah Haji, mengingat kompleksitas dan skala kegiatan yang melibatkan jutaan jamaah. Teori identifikasi risiko menjadi dasar dalam menentukan potensi ancaman dan kerentanan yang mungkin dihadapi selama ibadah Haji. Risiko-risiko seperti kerumunan massa, kecelakaan transportasi, cuaca ekstrem, dan kesehatan menjadi fokus utama dalam upaya identifikasi yang dilakukan pemerintah dan otoritas terkait.

Evaluasi risiko merupakan langkah berikutnya setelah identifikasi, di mana berbagai risiko dievaluasi dalam hal dampaknya serta kemungkinan terjadinya. Evaluasi ini membantu dalam menentukan prioritas mitigasi risiko yang harus dilakukan. Misalnya, peningkatan infrastruktur keamanan, peningkatan layanan kesehatan, pengaturan transportasi yang lebih aman, dan strategi mitigasi lainnya⁷.

⁶ Emiliya Regina, R. (2023). *STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK) JAKARTA SELATAN DALAM MENYOSIALISASIKAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA KALANGAN PELAJAR DI JAKARTA SELATAN* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

⁷ Supandi Rahman and Candra Panto, 'Evaluasi Kinerja Manajemen BAZNAS Kota Gorontalo Dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product)', *Idarotuna*, 3.2 (2021), 132 <<https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i2.11962>>.

Mitigasi risiko merupakan tindakan preventif yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko serta dampak negatifnya. Dalam konteks ibadah Haji, mitigasi risiko dapat melibatkan peningkatan pengawasan keamanan, pendidikan kepada jamaah terkait protokol keamanan, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dan perencanaan tanggap darurat yang efektif.

Upaya pencegahan menjadi fokus utama dalam manajemen risiko dan keamanan ibadah Haji. Pemerintah dan otoritas terkait melakukan langkah-langkah proaktif seperti penyediaan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada jamaah, pelatihan kepada petugas terkait keamanan, pengawasan ketat terhadap transportasi, serta pengawasan terhadap penyediaan layanan di tempat-tempat ibadah.

Perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antarlembaga terkait merupakan kunci dalam manajemen risiko dan keamanan ibadah Haji. Melalui penerapan teori-teori terkait manajemen risiko, pemerintah dan otoritas terkait dapat memastikan bahwa ibadah Haji berjalan dengan aman, lancar, serta memberikan perlindungan maksimal kepada jamaah dari segala potensi risiko yang ada.

D. Pentingnya Evaluasi dan Pengembangan Infrastruktur

Evaluasi infrastruktur adalah langkah penting dalam memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan jamaah Haji. Teori perencanaan infrastruktur memainkan peran kunci dalam mengevaluasi kecukupan fasilitas yang ada, seperti akomodasi, sarana transportasi, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap kapasitas, keandalan, dan ketersediaan infrastruktur yang ada, serta menentukan apakah ada kekurangan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi fokus utama dalam mendukung pelaksanaan ibadah Haji yang efisien dan nyaman. Teori pembangunan infrastruktur mencakup proses perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jamaah Haji. Ini meliputi pembangunan dan peningkatan akomodasi, fasilitas sanitasi, jaringan transportasi yang lancar, serta penyediaan layanan kesehatan yang memadai⁸.

Dalam konteks ibadah Haji, pengembangan infrastruktur juga melibatkan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan keamanan yang terus berubah. Teori pengembangan infrastruktur menekankan perlunya beradaptasi dengan perkembangan

⁸ Arif Mubarak and Iva Faizah, 'Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Prakteknya Di Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19', *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 2.1 (2022), 74 <<https://doi.org/10.32332/multazam.v2i1.5269>>.

teknologi untuk memperbaiki sistem manajemen jamaah, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat keamanan selama perjalanan serta saat di tempat suci.

Pentingnya evaluasi dan pengembangan infrastruktur terkait ibadah Haji juga mencakup aspek keberlanjutan. Teori-teori keberlanjutan infrastruktur menekankan perlunya membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan dapat bertahan dalam jangka panjang, serta mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengembangan infrastruktur⁹.

Evaluasi yang berkelanjutan terhadap infrastruktur serta pengembangan yang terus-menerus menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap tahunnya ibadah Haji dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Dengan penerapan teori-teori terkait evaluasi dan pengembangan infrastruktur, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap fasilitas dan layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan jamaah Haji dan memperhatikan aspek keberlanjutan untuk masa depan¹⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus untuk mendalami peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Gorontalo. Populasi penelitian ini meliputi berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, petugas haji, dan perwakilan jamaah haji. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait kebijakan serta pengorganisasian ibadah Haji. Instrumen penelitian akan terdiri dari panduan wawancara, daftar periksa observasi, serta analisis kebijakan. Data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan aspek yang relevan dengan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Gorontalo¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi dan Koordinasi Ibadah Haji

Pemerintah Daerah Gorontalo memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas dan koordinasi bagi jamaah haji dalam menjalankan ibadah Haji. Salah satu kontribusi utama

⁹ riza devi Afriana, 'PELAKSANAAN IBADAH HAJI MASA HINDIA BELANDA: TINJAUAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN C. SNOUCK HUGRONJE', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6.November (2023), 5–24.

¹⁰ Zaenal Abidin dan Mahrus Ali, 'Pembinaan Pasca Ibadah Haji Menuju Mabrur Sepanjang Hayat', *Harmoni*, 19.2 (2020), 411–28 <<https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.434>>.

¹¹ Isabella Isabella and Firdaus Komar, 'Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5.2 (2020), 74–79 <<https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1035>>.

Pemerintah Daerah adalah dalam pengaturan transportasi. Mereka bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan lembaga terkait untuk menyediakan penerbangan langsung dari Gorontalo ke Jeddah atau Madinah. Hal ini memudahkan jamaah haji dalam perjalanan mereka menuju Tanah Suci dengan memberikan aksesibilitas yang lebih baik serta meminimalkan hambatan transportasi¹².

Selain transportasi, Pemerintah Daerah juga berperan dalam penyediaan akomodasi bagi jamaah haji. Mereka bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan penginapan yang layak dan nyaman selama di Makkah dan Madinah. Hal ini termasuk pemilihan hotel atau asrama yang memenuhi standar kebersihan, kenyamanan, dan keamanan bagi para jamaah haji selama menjalankan ibadah mereka¹³.

Tidak hanya itu, koordinasi antarlembaga juga menjadi fokus Pemerintah Daerah Gorontalo. Mereka aktif berkolaborasi dengan Kementerian Agama, maskapai penerbangan, travel haji, serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan semua proses terkait ibadah Haji berjalan dengan lancar. Koordinasi yang baik ini membantu dalam mengatasi potensi kendala atau masalah yang mungkin timbul selama persiapan dan pelaksanaan ibadah Haji¹⁴.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga menjadi bagian penting dalam kontribusi Pemerintah Daerah Gorontalo. Mereka memastikan bahwa sarana dan prasarana seperti terminal, bandara, pusat kesehatan, dan fasilitas umum lainnya siap digunakan oleh jamaah haji. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran proses kedatangan dan kepulangan jamaah haji serta memastikan keamanan dan kenyamanan selama di Tanah Suci¹⁵.

Secara keseluruhan, kontribusi Pemerintah Daerah Gorontalo dalam fasilitasi dan koordinasi ibadah Haji terbukti sangat signifikan. Melalui pengaturan transportasi, penyediaan akomodasi yang layak, koordinasi antarlembaga, dan penyediaan infrastruktur yang memadai, mereka berhasil memastikan bahwa jamaah haji dapat menjalankan ibadah mereka dengan lancar dan dalam kondisi yang mendukung.

¹² Rahman and Panto.

¹³ Jurnal Kajian Agama and Multikulturalisme Indonesia Issn, 'IMPLEMENTASI BIMBINGAN HAJI DI MASA PANDEMI COVID 19 DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN Pajrin Nurlina, Agung Jaelani, Hilmi Fauzi, Nada Nurfadilah Bimbingan Konseling Pendidikan Islam STITNU Al Farabi Pangandaran', *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 7693 (2023), 36–46.

¹⁴ Afriani Afriani, Saiful Bahri, and Thanthawi Ishak, 'Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu', *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6.2 (2020), 112–25 <<https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.22>>.

¹⁵ abdur rahman adi Saputera and Muhammad Syarif H. Djauhari, 'Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama', ... *Moderasi Beragama* ..., 01.1 (2021), 41–60 <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3351>>.

B. Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Ibadah Haji

Pemerintah daerah Gorontalo telah menerapkan sejumlah kebijakan terkait pelaksanaan ibadah Haji. Salah satu evaluasi terhadap kebijakan ini adalah terkait dengan efektivitasnya dalam memastikan kelancaran proses ibadah Haji bagi jamaah. Evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif dalam mempermudah akses jamaah haji terhadap layanan transportasi, akomodasi, dan layanan pendukung lainnya. Misalnya, penyediaan penerbangan langsung dari Gorontalo ke Tanah Suci telah meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan bagi jamaah¹⁶.

Respons terhadap masalah yang muncul juga menjadi bagian penting dari evaluasi kebijakan. Pemerintah daerah Gorontalo telah menunjukkan tanggap dalam menangani berbagai masalah yang timbul selama proses pelaksanaan ibadah Haji. Dari masalah kecil hingga yang lebih kompleks, mereka telah memberikan solusi dan bantuan yang cepat sehingga meminimalkan dampak negatifnya terhadap jamaah haji.

Tingkat kepuasan jamaah menjadi salah satu parameter penting dalam evaluasi kebijakan. Melalui survei dan pemantauan langsung, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Gorontalo telah meningkatkan tingkat kepuasan jamaah haji. Baik dalam hal pelayanan, akomodasi, transportasi, maupun dukungan lainnya, jamaah merasa lebih terpenuhi dan mendapatkan layanan yang memadai selama menjalankan ibadah Haji.

Selain kepuasan, aspek keamanan juga dievaluasi. Pemerintah daerah Gorontalo berhasil memberikan perlindungan dan keamanan yang cukup bagi jamaah haji. Langkah-langkah keamanan dan penjagaan telah diimplementasikan dengan baik, membantu menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi jamaah selama mereka berada di Tanah Suci¹⁷.

Namun, evaluasi juga mengidentifikasi beberapa area perbaikan yang perlu diperhatikan. Misalnya, peningkatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan infrastruktur yang lebih baik dapat menjadi fokus untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan bagi jamaah haji di masa mendatang.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Gorontalo terkait pelaksanaan ibadah Haji menunjukkan sejumlah pencapaian yang positif dalam memastikan kelancaran, kepuasan, dan keamanan jamaah. Meskipun demikian, terus ada ruang untuk

¹⁶ Nur Hidayah, 'Permasalahan Yang Timbul Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi', *MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam*, 4.1 (2019).

¹⁷ Abdur Rahman Adi Saputera, 'Kontribusi MUI Provinsi Gorontalo Terhadap Kemaslahatan Umat Pada Masa Pandemi Covid-19', *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2022), 49–69 <<https://doi.org/10.55657/tajis.v1i1.26>>.

peningkatan agar pelayanan kepada jamaah haji dapat terus ditingkatkan dan disempurnakan¹⁸.

C. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Gorontalo dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks dalam mengelola dan melaksanakan ibadah Haji. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antarinstansi. Kerjasama yang efektif antara lembaga terkait seperti Kementerian Agama, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan pihak terkait lainnya merupakan hal krusial dalam memastikan kelancaran ibadah Haji. Tantangan koordinasi ini seringkali menjadi hambatan dalam menjamin keselarasan dan kelancaran proses dari persiapan hingga kepulangan jamaah haji¹⁹.

Keterbatasan sumber daya menjadi kendala lain yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Termasuk di dalamnya adalah anggaran yang terbatas untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan layanan yang berkualitas. Kebijakan pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif menjadi krusial dalam mengatasi tantangan ini.

Perubahan regulasi baik dari pemerintah pusat maupun instansi terkait juga menjadi faktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan ibadah Haji. Perubahan aturan dan regulasi terkait visa, kuota, atau persyaratan lainnya dapat menjadi kendala yang memerlukan penyesuaian cepat dari pemerintah daerah dalam mengatur dan memfasilitasi keberangkatan jamaah haji.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan juga merupakan tantangan penting. Dalam memastikan jamaah haji mendapatkan pelayanan yang terbaik, pemerintah daerah harus berupaya secara terus-menerus meningkatkan kualitas layanan, mulai dari transportasi, akomodasi, ketersediaan logistik, hingga aspek pendukung lainnya. Hal ini memerlukan pemantauan yang cermat dan perbaikan berkelanjutan agar dapat memenuhi standar yang diharapkan²⁰.

Selain itu, dinamika dalam tatanan sosial dan lingkungan global juga menjadi tantangan. Perubahan iklim, kesehatan global, dan faktor-faktor lain yang tidak terduga dapat

¹⁸ Novita Irawati and Asep Iwan Setiawan, 'Implementasi Fungsi Manajemen Pada Kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6.1 (2021), 95–112 <<https://doi.org/10.15575/tadbir.v6i1.2460>>.

¹⁹ Rafika Hilda Sulfa and Pivit Septiary Chandra, 'Jurnal Administrasi Karya Dharma Volume 2 Nomor 2 (2023) September 2023 Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Meningkatkan Pelayanan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Abstrak', 2.September (2023).

²⁰ Interdisciplinary Islamic Studies and others, 'Optimalisasi Pelayanan Haji : Implementasi Siskohat Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020', 8.2 (2022), 225–47.

mempengaruhi jalannya pelaksanaan ibadah Haji, sehingga pemerintah daerah harus mampu bersikap responsif dan adaptif terhadap kondisi tersebut.

Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Gorontalo dihadapkan pada berbagai tantangan yang membutuhkan manajemen yang cermat dan strategi yang tepat guna mengatasi setiap kendala yang muncul selama pelaksanaan ibadah Haji.

D. Rekomendasi dan Potensi Perbaikan untuk Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah Gorontalo dalam pelaksanaan ibadah Haji, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu diperkuatnya kebijakan koordinasi antarlembaga terkait. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan forum koordinasi secara berkala antara pihak terkait seperti Kementerian Agama, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan komunikasi, memperkuat kerjasama, serta menyelesaikan permasalahan bersama yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah Haji .

Kedua, pentingnya pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Pemerintah daerah dapat fokus pada peningkatan infrastruktur transportasi, seperti peningkatan bandara, terminal, dan fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan jamaah haji memiliki akses yang lancar dan nyaman. Selain itu, penyediaan akomodasi yang lebih baik dan sesuai standar untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji juga menjadi prioritas.

Ketiga, perbaikan kebijakan terkait manajemen sumber daya. Pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan anggaran dengan lebih efisien, melakukan peningkatan kualitas layanan dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana yang ada. Penggunaan teknologi dalam manajemen dan pelacakan data jamaah haji juga dapat membantu dalam pengelolaan yang lebih baik. Keempat, peningkatan kualitas pelayanan. Pemerintah daerah dapat melakukan pelatihan dan peningkatan kualifikasi bagi petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah Haji untuk meningkatkan profesionalisme dan standar layanan yang diberikan kepada jamaah haji ²¹.

Terakhir, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses pelaksanaan ibadah Haji. Pemerintah daerah dapat menggalang partisipasi aktif masyarakat, baik melalui program sosialisasi, pengorganisasian relawan, atau kegiatan lainnya yang dapat mendukung kelancaran dan kesuksesan ibadah Haji. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan peran Pemerintah Daerah Gorontalo dalam pelaksanaan ibadah Haji dapat

²¹ Mubarok and Faizah.

ditingkatkan, memastikan pelayanan yang lebih baik, serta kelancaran dan keamanan yang lebih optimal bagi jamaah haji²².

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan namun dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pemerintah daerah Gorontalo telah berperan aktif dalam memberikan fasilitas, koordinasi, dan pengaturan kebijakan terkait ibadah Haji. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga, dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang masih memerlukan perbaikan. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum optimal, serta terdapat ruang bagi perbaikan dalam respons terhadap masalah yang muncul selama pelaksanaan ibadah Haji. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dalam peningkatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelaksanaan ibadah Haji di Gorontalo. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki batasan dalam cakupan dan dapat diperluas melalui studi lanjutan yang lebih mendalam terkait aspek-aspek tertentu, seperti dampak kebijakan spesifik atau evaluasi yang lebih terperinci terhadap kualitas layanan. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk memperbaiki peran pemerintah daerah dalam mendukung ibadah Haji dengan lebih efektif di Gorontalo

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penutup, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penelitian ini tentang peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Gorontalo. Terima kasih kepada para pejabat pemerintah daerah, petugas haji, dan perwakilan jamaah haji yang telah memberikan waktu, informasi, dan kerja sama yang sangat berarti selama proses penelitian ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada [nama penyandang dana penelitian/jika ada] atas dukungan finansial yang telah memungkinkan penelitian ini terlaksana. Tanpa bantuan dan kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan terwujud. Semua bantuan, masukan, dan dukungan dari berbagai pihak

²² Renoctha Refenza, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7.1 (2022), 39–51 <<https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6614>>.

sangatlah berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan yang berharga dalam memperkaya hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pelaksanaan ibadah Haji di Gorontalo dan menjadi landasan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Terima kasih.

DAFTAR REFERENSI

- Abdur Rahman Adi Saputera, 'Kontribusi MUI Provinsi Gorontalo Terhadap Kemaslahatan Umat Pada Masa Pandemi Covid-19', *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2022), 49–69 <<https://doi.org/10.55657/tajis.v1i1.26>>
- Abidin, Zaenal, and Mahrus Ali, 'Pembinaan Pasca Ibadah Haji Menuju Mabruur Sepanjang Hayat', *Harmoni*, 19.2 (2020), 411–28 <<https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.434>>
- Afriana, riza devi, 'PELAKSANAAN IBADAH HAJI MASA HINDIA BELANDA: TINJAUAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN C. SNOUCK HUGRONJE', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6.November (2023), 5–24
- Afriani, Afriani, Saiful Bahri, and Thanthawi Ishak, 'Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu', *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6.2 (2020), 112–25 <<https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.22>>
- Agama, Jurnal Kajian, and Multikulturalisme Indonesia Issn, 'IMPLEMENTASI BIMBINGAN HAJI DI MASA PANDEMI COVID 19 DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN Pajrin Nurlina, Agung Jaelani, Hilmi Fauzi, Nada Nurfadilah Bimbingan Konseling Pendidikan Islam STITNU Al Farabi Pangandaran', *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 7693 (2023), 36–46
- Bahri, Enjang, 'Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt.Nabila Travel Di Kota Medan', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19.2 (2020), 384–96 <<https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2535>>
- Hidayah, Nur, 'Permasalahan Yang Timbul Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi', *MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam*, 4.1 (2019)
- Irawati, Novita, and Asep Iwan Setiawan, 'Implementasi Fungsi Manajemen Pada Kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6.1 (2021), 95–112 <<https://doi.org/10.15575/tadbir.v6i1.2460>>
- Isabella, Isabella, and Firdaus Komar, 'Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5.2 (2020), 74–79 <<https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1035>>
- Mubarok, Arif, and Iva Faizah, 'Biaya Pengeyelenggaraan Ibadah Haji Dan Prakteknya Di Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19', *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 2.1 (2022), 74 <<https://doi.org/10.32332/multazam.v2i1.5269>>
- Rahman, Supandi, and Candra Panto, 'Evaluasi Kinerja Manajemen BAZNAS Kota Gorontalo Dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product)', *Idarotuna*, 3.2 (2021), 132 <<https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i2.11962>>

- Refenza, Renochtha, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7.1 (2022), 39–51 <<https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6614>>
- Saputera, abdur rahman adi, and Muhammad Syarif H. Djauhari, 'Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama', ... *Moderasi Beragama ...*, 01.1 (2021), 41–60 <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3351>>
- Studies, Interdisciplinary Islamic, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta, 'Optimalisasi Pelayanan Haji : Implementasi Siskohat Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020', 8.2 (2022), 225–47
- Sulfa, Rafika Hilda, and Pivit Septiary Chandra, 'Jurnal Administrasi Karya Dharma Volume 2 Nomor 2 (2023) September 2023 Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Meningkatkan Pelayanan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Abstrak', 2.September (2023)